

The background features a decorative graphic consisting of three concentric blue circles of varying sizes, each with a darker blue center and a lighter blue outer ring. These circles are positioned in the upper right and lower right areas. Two thin, light blue diagonal lines cross the page, one from the top left to the bottom right, and another from the top right to the bottom left, intersecting near the center.

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika perundang-undang No 86 Tahun 2017 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana Dokumen ini telah Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026' dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf dilingkungan Sekretariat daerah untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dimasa yang akan datang pada khususnya.

Tana Paser, Agustus 2023
Sekretaris Daerah



Drs. Katsul Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A LATAR BELAKANG	1
B LANDASAN HUKUM	2
C MAKSUD DAN TUJUAN	4
D SISTEMATIKA	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAER TAHUN LALU.....	6
A EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	6
B ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	54
C ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	77
D REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	78
E PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	98
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	101
A TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	101
B TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER.....	102
C PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	103
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	117
BAB V PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

TC.29	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Hal 14
TC.30	Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser	Hal 56
TC.31	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024	Hal 80
TC.32	Usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2024	Hal 100
TC.33	Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra	Hal 107

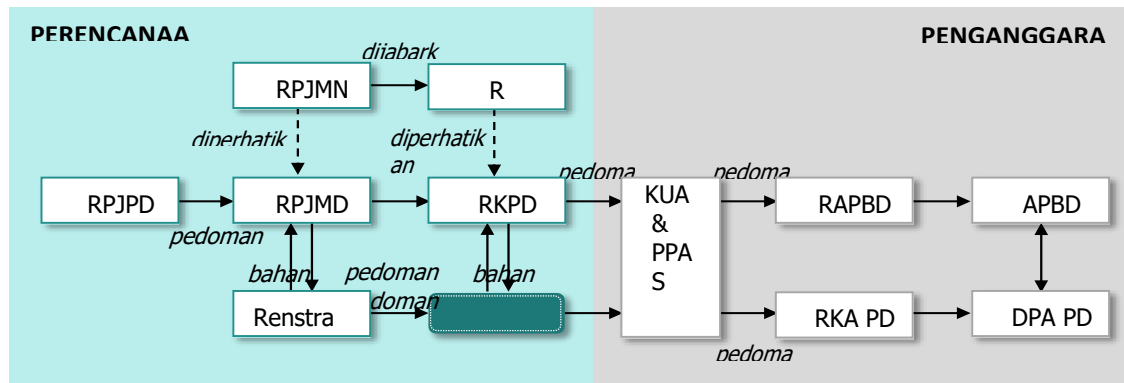
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR : 00.3.3.2/KEP- /2023
TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2024. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2023 yang terdampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya Ranwal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 422);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 5) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 9) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMDTAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Ranwal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 didasarkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, untuk mengetahui ;

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun harus dilakukan

seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2023.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan **3 program, 21 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja** sedangkan yang **tidak memenuhi target kinerja terdapat 1 kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan**. Secara rinci diuraikan sebagai berikut evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Nilai Reformasi Birokrasi" dengan target tahun 2022 sebesar 100%, realisasi sebesar 41.41% (capaian 87,50%). Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 2 (dua) Sub Kegiatan telah mencapai 35,94%, dan 55,20%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" dengan target tahun 2022

sebesar 100% dan realisasi sebesar 66,74% (capaian 77,78%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 88,33%, 75,00% dan 75,00%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 0% (capaian 00,00%). Pada kegiatan ini terdapat 1 (Satu) Sub Kegiatan, dimana target indikator kinerja dari 1 (Satu) Sub Kegiatan tidak mencapai target karena tidak dilaksanakan

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 40%). Pada kegiatan ini terdapat 2 (Dua) Sub Kegiatan, dimana salah satu sub kegiatan tidak mencapai target indikator kinerja dari 2 (Dua) Sub Kegiatan telah mencapai 80,00% dan 0 % dikarenakan tidak dilaksanakan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 70,54%). Pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub Kegiatan, dimana target indikator kinerja dari 8 (delapan) Sub Kegiatan telah mencapai 68,75%, 105,88%, 88%, 100%, 100%, 66,67%, 100%, 26,67%, 69,33%, 91,67%, 73%, 26,27% dan 0% karena tidak dilaksanakan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 58,33%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana

masing-masing target indikator kinerja dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 00%, 75%, dan 100% satu sub kegiatan tidak dilaksanakan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Pemeliharaan BMD" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 74,45%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 66,67%, 90%, dan 66,67%.

8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 37,50%). Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 4 (Empat) Sub Kegiatan telah mencapai 75%, 75%, 0% dan 0% Karena kegiatan tersebut belum dilaksanakan.

9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 75% (capaian 75%). Pada kegiatan ini terdapat 2 (Dua) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 2 (Dua) Sub Kegiatan telah mencapai 75% dan 75%.

10. Penataan Organisasi

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 72,70%). Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 5 (lima) Sub Kegiatan telah mencapai 81,22%, 96,67%, 33,33%, 83,33% dan 37,50%.

11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 71,67%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 70%, 72,50% dan 70%.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Administrasi Tata Pemerintahan

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 82,70%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 67,69%, 84,17% dan 100%.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 69,33%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 61%, 81% dan 66%.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 82,70%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 78,53%, 89,39% dan 100%.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi" dengan target tahun 2022 sebesar 54% dan realisasi

sebesar 54% (capaian 49,23%). Pada kegiatan ini terdapat 2 (Dua) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 2 (Dua) Sub Kegiatan telah mencapai 49,23% dan 49,23%.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 52,50%). Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 4 (empat) Sub Kegiatan telah mencapai 40%, 85%, 70% dan 00% untuk sub kegiatan ini belum dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 80,00%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 80%, 80% dan 80%.

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Hasil Proses PBJ" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 72,27%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 62,63%, 75% dan 79,17%

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam" dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 91,56%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 93,33%, 90,67% dan 93,33%.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun lalu (tahun n-2/tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/tahun 2023) adalah sebagaimana Tabel T-C.29. berikut :

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023 TAHUN BERJALAN
KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/, Kegiatan (Output)dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021(Tahun n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (tahun berjalan/n-1)	
						Target RKPD Tahun 2022 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022 (Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$(9)=(7)/(6)*100$	10	$(11)=(5)+(7)+(9)$	$(11)=(10)/(4)*(10)$
4	Urusan										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat.									

4.01.01.2.01	Perencanaan, Pen- ganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah									
		Nilai Reformasi Birokrasi									
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	8	25	8	6	75	8	39	190.13
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laopran hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKPD	Dokume n	3	0	0	0	0	3	3	3.00
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	6	7	6	6	100	6	19	60.17

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi Renja dan Teptra Perangkat Daerah	Buku	12	7	0	0	0	0	7	4.08
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayann administrasi keuangan perangkat daerah									
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B ulan	2268	12	166	166	100	200	244	75.65
		Ketepatan Waktu pembayaran gaji ASN dan hak-haknya	Bulan	12	12	12	10	83.33	12	22	40.33

4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	725	35	25	25	100	12	72	7.15
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	2	2	1	50	0	3	2.25
		Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	9	75	0	21	36.75
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	12	5	12	9	75	12	26	56.33

		SKPD									
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan								
				4	4	0	0	#DIV/0!	4	8	16
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah									
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen								
				3	0	3	0	0	3	3	3

4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi									
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	100	100	100	80	80	100	280	784
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	180	180	180	0	0	180	360	720
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah									

4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	12	11	91.67	16	43	115.56
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	17	17	18	105.88	17	52	159.06
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	26	25	22	88	25	73	213.16
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	70	70	100	30	130	563.33
		Bahan Kebersihan dan bahan Pembersih	Jenis	45	40	40	40	100	25	105	245.00

		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	35	30	30	30	100	17	77	169.40
		Petugas Kebersihan	Orang	37	35	35	35	100	35	105	297.97
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	8	39	39	100	9	56	348.44
		Fotocopy	Lembar	120000	35000	60000	40000	66.67	40000	115000	110208.33
		Jenis Cetak	Jenis	25	8	9	9	100	7	24	23.04
		Penjilidan	Buku	34	30	30	8	26.67	8	46	62.24
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	150	0	150	104	69.33	150	254	430.11
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	0	150	150	100.00	150	300	600.00
		Jumlah Makanan dan Minuman	Porsi	14000	1350	6000	5500	91.67	4500	23500	75,53
		Jumlah	Kotak	18000	1500	7500	5500	73.33	3500	9000	50,32

		Makanan dan Minuman									
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	165	150	150	40	26.67	35	225	306.82
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	0	12	11	91.67	12	23	44.08
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah									
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	12	5	41.67	12	29	70.08
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi									

4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	Laporan	1100	600	1000	900	90	1000	2500	5682
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	9	75	12	33	90.75
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5	5	3	60	5	13	33.8
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah									

4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	5	3	2	66.67	3	10	33
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaiki	Unit	25	21	18	18	100.00	7	46	85
		Jumlah Kendaraan Dinas yang diperbaiki	Unit	25	22	18	18	100.00	8	48	92
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	19	20	18	90	20	57	162

4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	3	2	3	3	100	3	8	21
		Jumlah item gedung sekretariat yang dipelihara	Unit	7	7	6	6	100	4	17	41
		jumlah rumah dinas yang dipelihara	Unit	7	8	7	7	100	4	19	52
		jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Unit	3	3	2	2	100	1	6	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana										
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	15	10	12	12	100	8	30	60

4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi									
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	28	28	28	28	100	28	84	252
		Ketepatan Waktu pembayaran Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	100	12	36	108

4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10	8	9	9	100.00	10	27	72.9
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	6	12	11	91.67	8	25	78.12
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	12	8	12	10	83.33	12	30	75.00

4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi									
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	10	12	9	75	12	31	80
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	10	12	9	75	12	31	80
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	10	11	11	100	8	29	70.08
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang									

		tertata dengan baik									
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokume n	205	41	41	41	100	41	123	50
		Jumlah retusi PD yang disusun dan revisi	PD	205	41	41	32	78.05	40	113	50.44
		Jumlah PD yang dievaluasi	PD	205	41	41	32	78.05	40	113	50.44
		Jumlah Inforjab Struktur PD yang dievaluasi	PD	205	41	41	41	100	40	122	50.02
		Jumlah Anjab Struktural pelaksana dan fungsional PD yang disusun	PD	205	41	41	41	100	40	122	50.02
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebutuhan Pegawai	Dokume n	41	2	2	1	50	40	43	45.10

4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	25	5	5	5	100	4	14	39.2
		Jumlah PD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	PD	40	12	15	13	86.67	8	33	76.13
		Jumlah PD yang menerapkan pelayanan publik inovatif	PD	40	10	10	10	100	5	25	78.13
		Jumlah PD yang menyusun dan Menerapkan SOP sesuai ketentuan	PD	40	30	42	42	100	5	77	74.13
		Persentase PD yang menerapkan tata naskah dinas sesuai perundangan	Persen	100	25	75	75	100	60	160	2114

		dokumen Produk Hukum Petunjuk teniks Penyusunan SOP	Dokume n	3750	750	750	750	100	250	1750	83.33
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokume n	2	2	2		0	2	4	8
		Jumlah PD dengan Nilai RB > 70	PD	8	2	15	10	66.67	2	14	24.5
		Jumlah PD yang mengikuti sosialisasi pedoman pelaksanaan budaya kerja	PD	205	42	42	42	100.00	40	124	50.10
		Dokumen Hasil RB	Dokume n	1	1	1	1	100	1	3	9
		Perangkat daerah yang dievaluasi (LKJIP)	PD	41	41	41	41	100	41	123	369

		Jumlah Koordinasi Bidang Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kali	8	3	5	5	100	4	12	18
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kali	15	6	8	8	100	8	22	32.27
		Jumlah Dokumen LKJIP Kabupaten yang tersusun	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	1.8
4.01.01.2.13.04	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	9
		Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kualitas pelayanan	PD	205	42	42	35	83.33	35	112	89.67

		publik									
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	3	5	8.33
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	45	40	4	3	50	25	43	98.76
		Jumlah Dokumen LKJIP Kabupaten yang tersusun	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	1.8
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	10	10	10	12	12	86.75

		Jumlah fasilitasi kegiatan keprotokolan dengan baik, tertib dan lancar		50	20	15	15	100	33	23	54.88
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	36	18	12	9	75.00	36	15	50.25
		Jumlah Konsep Pidato	Konsep	1750	365	260	255	98.08	335	955	87.65
		Jumlah Analisis Informasi	Buah	15	8	7	7	100.00	6	21	29.4
		Jumlah Pers Rilli	Buah	1750	500	350	275	78.57	215	990	76.80
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	15	150	105	70.00	12	132	1452
		Jumlah kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan	Kali	1450	350	75	75	100.00	35	460	70.22

		dengan teratur									
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti</i>									
		<i>Nilai LPPD</i>									
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi		100							
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokume n	23	20	5	5	100	23	48	100
		Jumlah Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besra Nasional	Kali	25	13	13	5	38.46	17	35	49

		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu di Monitoring	Dokumen	15	10	10	10	100	10	30	60
		Rancangan Kebijakan	Dokumen	15	8	5	5	100	5	18	22
		Jumlah Camat dan Kecamatan yang dinilai	Kecamatan	10	10	10	10	100	10	30	90
		Jumlah Lurah dan Kelurahan yang dinilai	Kelurahan	10	5	5	5	100	5	15	23
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	9	5	10	10	100	9	24	64
		Survey Identifikasi dan Rapat Koordinasi Segmen Batas Antar Desa Antar Kecamatan	Kali	15	3	3	3	100	2	8	4

		Survey Identifikasi dan Rapat Koordinasi Segmen batas Antar daerah	Kali	8	3	3	2	66.67	2	7	6
		Koordinasi Proses Penataan daerah	Kali	5	1	1	1	100	1	3	2
		Survey Identifikasi, Verifikasi, Pembakuan nama rupa - rupa bumi	Dokumen	5	10	10	7	70	6	23	106
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	3	5	8
		Jumlah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Dokumen	5	1	10	10	100	4	15	45
		Jumlah Laporan LPPD	Dokumen	20	1	5	5	100	41	13	60

		Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah Tahunan (LKPJ Tahunan)	Dokumen	5	1	15	15	100	9	25	125
		Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal	PD	42	42	6	6	100	5	53	67
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan									
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Dokumen	357	50	100	61	61	60	175	50

		Spiritual									
		Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi	Orang	750	8	175	150	85.71	117	275	101
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan bidang kesra	Kali	50	30	27	25	92.59	21	76	116
		jumlah Da'I pembangunan	Orang/Bulan	60	57	12	12	100	12	25	55
		kegiatan hari santri nasional	Kali	5	1	5	5	100	5	11	24
		jumlah penrima bantuan hibah	Kali	352	3	75	75	100	83	161	74
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	Dokumen	100		100	81	81	75	58	53

		Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									
		Jumlah koordinasi dan failitasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Kali	35	29	15	13	86.67	17	59	99
		jumlah kegiatan fasilitasi hibah	Kali	30	3	17	16	94.12	11	30	30

4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	15	5	54	66	66	15	96	493
		Jumlah monitoring dan evaluasi kepemudaan dan olahraga	Kali	8	15	8	7	87.5	9	31	120
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi		100							

4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokume n	1750	768	750	589	78.53	750	1125	83
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Dokume n	4	8	5	5	100	5	18	81
		Kasus hukum yang ditangani	Kasus	2	2	2	3	150	1	6	18
		laporan aksi HAM dan kabupaten Peduli HAM	Triwula n	4	4	4	4	100	4	12	36
		Kelurahan/Des a Sadar Hukum	Kelurah an/Desa	5	5	11	2	18.18	4	11	24
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentas i	Dokume n	874	100	100	100	100	335	365	50

4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi									
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	30	27	65	32	49.23	30	15	50
4.01.02.2.04.03	Evaluasi kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	30	27	65	32	49.23	37	10	40
4.01.03.2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti									
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi									
4.01.03.2.01.01	Koordinasi,Sinkronis	Jumlah	Dokume	20	5	5	2	40	20	12	6

	asi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	n								
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	42	5	5	5	100	42	12	6
		Jumlah fasilitasi ketersediaan bahan makanan pokok barang penting lainnya	Kali	25	5	7	6	85.71	8	12	6
		terfasilitasinya koordinasi administrasi penghapusan piutang daerah yang	Kali	25	20	8	8	100	4	12	6

		tertunggak									
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	20	5	10	7	70	20	12	6
4.01.03.2.01.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	25	5	5	5	100	25	12	6
		Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi	BLUD	10	2	2	2	100	2	12	6
		Rapat, Monitoring dan evaluasi percepatan dalam berusaha	Kali	35	20	15	13	86.67	17	12	6

4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan									
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	9	10	8	80	2	19	181
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12	10	10	8	80	12	30	75
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	10	10	8	80	12	30	75
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ									

4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokume n	1722	350	225	215	95.56	1705	985	50
		Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kali	18	3	12	12	100	13	28	44
		Fasilitasi pokja pemilihan untuk melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan (KAK/Spesifika si Teknis, Gambar, HPS dan Rancangan Kontrak/dari PPK	Paket	745	70	380	287	75.53	86	315	50

		Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa	Bulan	12	12	12	9	75	12	33	91
		Menyusun evaluasi dan laporan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	2
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	247	115	7	6	85.71	112	123	50
		Pengelolaan Layanan LPSE	Bulan	12	12	12	9	75.00	8	29	70
		Pemenuhan Standar Pelayanan LPSE	Dokumen	25	7	17	15	88.24	9	31	38
		Melakukan Koordinasi	Bulan	12	12	12	12	100.00	12	36	108

		dengan OPD Kab. Paser dan LKPP									
		Pemeliharaan Sistem Server LPSE	Unit	5	1	2	1	50.00	2	4	3
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	5	5	5	100	60	6	50
		Penyusunan Kode Etik, SOP Manajemen Risiko dan Dokumen Mitigasi Resiko	Dokume n	5	1	4	3	75	4	8	13
		Fasilitasi Pelaporan Korsupgah dan Stranas PK	Kali	18	1	1	1	100	1	3	1
		Fasilitasi Proses Penyesuaian/I npassing	Orang	15	5	6	5	83.33	4	14	13

		Jabatan Fungsional PPBJ									
		Penanganan Konsultasi, Aduan/Sanggah dan Pendampingan	Bulan	12	12	12	7	58.33	8	27	61
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam									
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	Dokumen	35	30	30	28	93.33	30	25	75

		Penanaman Modal, Tenaga Kerja									
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	30	30	25	22	88	25	15	50
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	Dokumen	35	40	30	28	93.33	30	15	45

		Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretaris Daerah

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
 - g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM/Standar Nasional		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	<i>Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.</i>			70	72	74	76	80	70	72	76	80	
3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kab. Paser			B	B	BB	BB	A	B	BB	BB	A	
4	Capaian Komponen Pengungkit Nilai RB Pada Sekretariat Daerah Kab. Paser			25	26	27	29	30	26	27	29	30	
5	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok		8	8	8	8	8	25	30	8	8	

6	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SETDA	Dokumen		6	6	6	6	6	7	6	6	6	
8	Laporan evaluasi Renja dan Teptra Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln		2268	2268	2268	2268	2268	2268	2268	2268	2268	
11	Ketepatan Waktu pembayaran gaji ASN dan hak-haknya			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
12	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen		12	12	12	12	12	12	12	12	12	

	Keuangan SKPD												
13	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
14	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan PNS dan Non PNS	Bulan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
15	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen		12	12	12	12	12	5	8	12	12	
16	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

18	Barang Milik Daerah yang diasuransikan	unit		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Jumlah Fasilitas Tata Usaha, Staf Ahli dan Kepegawaian	Berkas		100	100	100	100	100	100	80	100	100	
21	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisai	Orang		180	180	180	180	180	180	180	180	180	
22	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Jenis Komponen Listrik dan Penerangan	Jenis		16	16	16	16	16	16	11	16	16	
24	Jumlah Jenis Barang Perlengkapan Kantor	Jenis		17	17	17	17	17	17	18	17	17	
25	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Item		25	25	25	25	25	26	22	25	25	
26	Bahan Kebersihan dan bahan Pembersih	Jenis		40	40	40	40	40	40	40	40	40	
27	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis		30	30	30	30	30	30	30	30	30	
28	Petugas Kebersihan			35	35	35	35	35	35	35	35	35	

29	Fotocopy	Lembar		60000	60000	60000	60000	60000	66667	40000	60000	60000	
30	Jenis Cetakan	Jenis		9	9	9	9	9	9	9	9	9	
31	Penjilidan	Buku		30	30	30	30	30	30	8	30	30	
32	Jumlah Tamu yang terlayani dan jumlah kunjungan kerja	Kali		150	150	150	150	150	150	104	150	150	
33	Jumlah Makanan dan Minuman	Porsi		150	150	150	150	150	13500	5500	150	150	
34	Jumlah Makanan dan Minuman	Kotak		7500	7500	7500	7500	7500	650	550	7500	7500	
35	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali		150	150	150	150	150	150	40	150	150	
36	Penatausahaan Arsip Dinamis yang terlaksana	Bulan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
37	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
38	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit		12	12	12	12	12	12	4	12	12	
39	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
40	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	Lembar		1000	1000	1100	1200	1300	600	500	1200	1300	

41	Terbayarnya Rek Air, Listrik dan Internet	Bulan		12	12	12	12	12	12	9	12	12	
42	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	unit		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
43	Persentase Pemeliharaan BMD			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
44	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	Unit		3	3	3	3	3	5	2	3	3	
45	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Unit		20	20	20	20	20	21	18	20	20	
46	Gedung Kantor yang direhab	Unit		3	3	3	3	3	22	2	3	3	
47	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
48	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		28	28	28	28	28	28	28	28	28	

49	Ketepatan Waktu pembayaran Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
50	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala daerah yang tersedia	Stel		14	14	14	14	14	14	14	14	14	
51	Tersedianya Medical Check Up Kepala daerah dan wakil Kepala daerah	Bulan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
52	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala daerah	Orang/Bulan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
53	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
54	Tersedianya kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paket		12	12	12	12	12	10	9	12	12	
55	Tersedianya kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	Paket		12	12	12	12	12	10	9	12	12	

	Daerah												
56	Tersedianya kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Paket		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
57	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
58	Jumlah retusi PD yang disusun dan revisi	PD		41	41	41	41	41	41	32	41	41	
59	Jumlah PD yang dievaluasi	PD		41	41	41	41	41	41	32	41	41	
60	Jumlah Inforjab Struktur PD yang dievaluasi	PD		41	41	41	41	41	41	41	41	41	
61	Jumlah Anjab Struktural pelaksana dan fungsional PD yang disusun	PD		41	41	41	41	41	41	41	41	41	
62	Jumlah Dokumen Penetapan Kebutuhan Pegawai	Dokumen		2	2	2	2	2	2	1	2	2	
63	Jumlah PD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	PD		15	15	15	15	15	12	13	15	15	

64	Jumlah PD yang menerapkan pelayanan publik inovatif	PD		10	10	10	10	10	10	10	10	10	
65	Jumlah PD yang merumuskan dan melaksanakan SOP sesuai ketentuan	PD		42	42	42	42	42	30	42	42	42	
66	Dokumen Produk hukum petunjuk teknis penyusunan SOP			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
67	Persentase PD yang menerapkan tata naskah dinas sesuai perundangan	Persen		75	75	75	75	75	100	75	75	75	
68	Jumlah PD dengan Nilai RB > 70	PD		15	15	15	15	15	0	10	15	15	
69	Dokumen Hasil Evaluasi RB								1				
70	Jumlah PD yang mengikuti sosialisasi pedoman pelaksanaan budaya kerja	PD		42	42	42	42	42	42	42	42	42	
71	Perangkat Daerah yang dimonitong dan dievaluasi kualitas pelayanan publik	PD		42	42	42	42	42	42	35	42	42	

72	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kali		4	4	4	4	4	3	3	4	4	
73	Jumlah Rakor yang diikuti			35	25	30	35	40	20	30	35	40	
74	Perangkat daerah yang dievaluasi (LKJIP)			41	41	41	41	41	41	41	41	41	
75	Jumlah Dokumen LKJIP Kabupaten yang tersusun	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
76	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
77	Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana	Kegiatan		150	150	150	150	150	150	150	150	150	
78	Jumlah fasilitasi kegiatan keprotokolan dengan baik, tertib dan lancar			15	5	5	5	5	5	5	5	5	
79	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bulan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
80	Jumlah Konsep Pidato			1500	150	150	150	150	150	150	150	150	
81	Jumlah Analisis Informasi			750	25	25	25	25	25	25	25	25	

82	Jumlah Pers Rilli			100	20	20	20	20	20	20	20	20	
83	Jumlah Dokumen Tugas Pimpinan	Dokumen		150	150	150	150	150	150	150	150	150	
84	Jumlah kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan dengan teratur			120	120	120	120	120	120	120	120	120	
85	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi			85	85	90	90	95	95	95	90	95	
86	<i>Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
87	<i>Nilai LPPD</i>			2,75	2,75	3,07	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	
88	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
89	Jumlah Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar	Kali		13	13	13	13	13	13	5	13	13	

	Nasional												
90	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu di Monitoring	Dokumen		10	10	10	10	10	10	10	10	10	
91	Rancangan Kebijakan	Dokumen		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
92	Jumlah Camat dan Kecamatan yang dinilai	Kecamatan		10	10	10	10	10	10	10	10	10	
93	Jumlah Lurah dan Kelurahan yang dinilai	Kelurahan		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
94	Survey Identifikasi dan Rapat Koordinasi Segmen Batas Antar Desa Antar Kecamatan	Kali		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
95	Survey Identifikasi dan Rapat Koordinasi Segmen batas Antar daerah	Kali		3	3	3	3	3	3	2	3	3	
96	Koordinasi Proses Penataan daerah	Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
97	Survey Identifikasi, Verifikasi, Pembakuan nama rupa -rupa bumi	Dokumen		10	10	10	10	10	10	7	10	10	

98	Jumlah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Dokumen		10	10	10	10	10	1	10	10	10	
99	Jumlah Laporan LPPD Perangkat Daerah	Dokumen		41	41	41	41	41	1	41	41	41	
100	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah Tahunan (LKPJ Tahunan)	Dokumen		15	15	15	15	15	1	15	15	15	
101	Perangakt Daerah yang menyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal	PD		6	6	6	6	6	42	6	6	6	
102	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
103	Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persen		100	100	100	100	100	100	61	100	100	
104	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi			750	125	125	125	125	125	125	125	125	
105	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan			500	100	100	100	100	30	100	100	100	

	bidang kesra												
106	jumlah Da'I pembangunan			20	20	20	20	20	20	20	20	20	
107	kegiatan hari santri nasional			5	5	5	5	5	5	5	5	5	
108	jumlah penrima bantuan hibah			750	200	250	200	200	200	200	200	200	
109	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persen		100	100	100	100	100	100	81	100	100	
110	Jumlah koordinasi dan failitasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial			153	50	75	65	65	65	65	65	65	
111	jumlah kegiatan fasilitasi hibah			750	150	175	135	135	135	135	135	135	
112	Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100	

113	Jumlah monitoring dan evaluasi kemudahan dan olahraga			35	25	25	25	25	15	25	25	25	
114	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
115	Jumlah Perda, Perbup, Instruksi, dan SK Bupati	Dokumen		750	750	750	750	750	768	589	750	750	
116	Kasus Hukum yang ditangani	Kasus		2	2	2	2	2	2	3	2	2	
117	Laporan Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM	Triwulan		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
118	Kelurahan / Desa Sadar Hukum	Kelurahan		11	11	11	11	11	6	2	11	11	
119	Himpunan Produk Hukum yang disampaikan ke Perangkat Daerah	Dokumen		100	100	100	100	100	100	75	100	100	
120	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi			50	54	54	56	60	60	60	56	60	
121	Jumlah Mou Kerjasama Dalam Negeri yang terlaksana	Mou		65	65	65	65	65	27	32	65	65	

122	Jumlah Mou yang telah dievaluasi pada pelaksanaan kerjasama	Mou		65	65	65	65	65	27	32	65	65	
123	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan yang meningkat			5.28	5.39	5.4	5.51	5.62	4.25	5.32	5.51	5.62	
124	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif			80	80	85	90	95	90	90	90	95	
125	<i>Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</i>			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
126	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
127	Jumlah BUMN dan BLUD dengan Kinerja Baik	Unit		5	2	2	2	2	2	2	2	2	
128	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan Distribusi	Dokumen		5	5	5	5	5	5	5	5	5	

	Perekonomian												
129	Jumlah fasilitasi ketersediaan bahan makanan pokok barang penting lainnya			75	25	25	25	25	25	25	25	25	
130	terfasilitasinya koordinasi administrasi penghapusan piutang daerah yang tertunggak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan pemantauan Kegiatan dan Pelaku Usaha Mikro Kecil	Dokumen		10	10	10	10	10	5	7	10	10	
132	Jumlah Berdirinya Puskesmas BLUD	Puskesmas		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
133	Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
134	Rapat, Monitoring dan evaluasi percepatan dalam berusaha			35	25	22	35	24	20	24	25	22	

135	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
136	Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan	Dokumen		10	10	10	10	10	9	8	10	10	
137	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Dokumen		10	10	10	10	10	10	8	10	10	
138	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Dokumen		10	10	10	10	10	10	8	10	10	
139	Persentase Hasil Proses PBJ			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
140	Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kali		12	12	12	12	12	3	12	12	12	
141	Fasilitasi pokja pemilihan untuk melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan (KAK/Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS	Paket		30	30	30	30	30	70	287	30	30	

	dan Rancangan Kontrak/dari PPK												
142	Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa	Bulan		12	12	12	12	12	12	9	12	12	
143	Menyusun evaluasi dan laporan fasilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Dokumen		1	1	1	1	1	1		1	1	
144	Pengelolaan Layanan LPSE	Bulan		12	12	12	12	12	12	9	12	12	
145	Pemenuhan Standar Pelayanan LPSE	Dokumen		17	17	17	17	17	6	0	17	17	
146	Melakukan Koordinasi dengan OPD Kab. Paser dan LKPP	Bulan		12	12	12	12	12	12	9	12	12	
147	Pemeliharaan Sistem Server LPSE	Unit		2	2	2	2	2	1	1	2	2	

148	Penyusunan Kode Etik, SOP Manajemen Risiko dan Dokumen Mitigasi Resiko	Dokumen		4	4	4	4	4	1	3	4	4	
149	Fasilitasi Pelaporan Korsupgah dan Stranas PK	Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
150	Fasilitasi Proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional PPBJ	Orang		6	6	6	6	6	5	5	6	6	
151	Penanganan Konsultasi, Aduan/Sanggha dan Pendampingan	Bulan		12	12	12	12	12	12	7	12	12	
152	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
153	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelautan dan perikanan	Dokumen		30	30	35	37	39	30	28	37	39	
154	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertimbangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen		25	25	30	32	32	30	22	32	32	

155	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen		30	30	35	37	39	40	28	37	39	
-----	--	---------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

Tujuan yang digunakan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2022 s/d 2026 ada 2 (dua) yaitu :

1. **Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi lintas sector pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**” memiliki 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu : **Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat** Sedangkan Sasaran yang digunakan mulai tahun 2022 ada 2 (dua) sasaran yaitu : **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien** dengan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP dan **Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel** dengan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi
2. **Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi lintas sector pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan**” memiliki 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu : Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan yang meningkat dengan efektif sedangkan sasaran yang digunakan ada 1 (satu) yaitu : **Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien** dengan memiliki 1 (satu indikator yaitu Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif. Dimana realisasinya tidak ada karena pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah belum menggunakan indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Sekretariat Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, keberadaannya sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah,

maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Meningkatkan Penataan Perangkat Daerah;
6. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam menjawab Permasalahan Pembangunan Daerah;
7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja terutama tata ruang kerja yang sebagian belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN PASER

Kode	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekretariat Daerah				Rp 122,482,469,155	Sekretariat Daerah				Rp 122,482,469,155	
A	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	Rp 4,998,467,561	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	Rp 4,998,467,561	
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Kab. Paser		Rp 2,064,638,383	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Kab. Paser		Rp 2,064,638,383	
A.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	Kab. Paser	100	Rp 2,064,638,383	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	Kab. Paser	100	Rp 2,064,638,383	
A.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	1705	Rp 785,574,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	1705	Rp 785,574,000	

A.1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Paser	245	Rp 74,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Paser	245	Rp 74,000,000	
A.1.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	12	Rp 05,064,383	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	12	Rp 05,064,383	
	Bagian Perekonomian		Kab. Paser		Rp ,285,227,404	Bagian Perekonomian		Kab. Paser		Rp 1,285,227,404	
A.2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	Kab. Paser	100	Rp ,285,227,404	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	Kab. Paser	100	Rp ,285,227,404	
A.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Kab. Paser	20	Rp 23,780,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Kab. Paser	20	Rp 23,780,000	
	Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Paser			Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Paser			
A.2.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Paser	42	Rp 33,526,850	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Paser	42	Rp 33,526,850	
A.2.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Kab. Paser	20	Rp 29,713,700	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Paser	20	Rp 29,713,700	

		Kecil									
A.2.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Paser	25	Rp 98,206,854	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Paser	25	Rp 198,206,854	
	Bagian Administrasi Pembangunan		Kab. Paser		Rp 868,684,900	Bagian Administrasi Pembangunan		Kab. Paser		Rp 868,684,900	
A.3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Administrasi Pembangunan	Kab. Paser	100	Rp 868,684,900	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Administrasi Pembangunan	Kab. Paser	100	Rp 868,684,900	
A.3.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Paser	12	Rp 53,605,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Paser	12	Rp 253,605,000	
A.3.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Paser	12	Rp 47,283,700	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Paser	12	Rp 247,283,700	
A.3.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Paser	12	Rp 367,796,200	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Paser	12	Rp 367,796,200	

	Bagian Sumber Daya Alam		Kab. Paser		Rp 79,916,874	Bagian Sumber Daya Alam		Kab. Paser		Rp 779,916,874	
A.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Paser	100	Rp 779,916,874	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Paser	100	Rp 779,916,874	
A.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	Kab. Paser			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	Kab. Paser			
		Modal, Tenaga Kerja	Kab. Paser	30	Rp 386,875,874		Modal, Tenaga Kerja	Kab. Paser	30	Rp 386,875,874	
A.4.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Paser	25	Rp 256,342,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Paser	25	Rp 256,342,000	

A.4.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Paser	30	Rp 136,699,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Paser	30	Rp 136,699,000	
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	Kab. Paser	100		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	Kab. Paser	100		
		2. Nilai LPPD	Kab. Paser		Rp 28,789,566,545		2. Nilai LPPD	Kab. Paser		Rp 28,789,566,545	
	Bagian Tata Pemerintahan				Rp 1,706,018,643	Bagian Tata Pemerintahan				Rp 1,706,018,643	
B.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 1,706,018,643	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 1,706,018,643	
B.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Paser	23	Rp 551,056,102	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Paser	23	Rp 551,056,102	
B.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Paser	9	Rp 705,537,596	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Paser	9	Rp 705,537,596	

B.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Paser	3	Rp 449,424,945	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Paser	3	Rp 449,424,945	
	Bagian Hukum				Rp ,684,298,571	Bagian Hukum				Rp 1,684,298,571	
B.2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	Kab. Paser	100	Rp ,684,298,571	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	Kab. Paser	100	Rp ,684,298,571	
B.2.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Paser	760	Rp 305,991,571	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Paser	760	Rp 305,991,571	
B.2.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Paser	2	Rp ,177,894,200	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Paser	2	Rp ,177,894,200	
B.2.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Paser	100	Rp 200,412,800	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Paser	100	Rp 200,412,800	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				Rp 24,933,788,902	Bagian Kesejahteraan Rakyat				Rp 4,933,788,902	
B.3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	Kab. Paser	100	Rp 24,933,788,902	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	Kab. Paser	100	Rp 4,933,788,902	
B.3.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Paser	357	Rp 16,375,809,902	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Paser	357	Rp 6,375,809,902	

B.3.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Paser	100	Rp 7,928,787,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Paser	100	Rp 7,928,787,000	
B.3.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	Kab. Paser	15	Rp 629,192,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	Kab. Paser	15	Rp 629,192,000	

		Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Paser				Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Paser			
	Bagian Kerjasama				Rp 465,460,429	Bagian Kerjasama				Rp 465,460,429	
B.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	Kab. Paser	100	Rp 65,460,429	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	Kab. Paser	100	Rp 465,460,429	
B.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Paser	30	Rp 32,910,029	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Paser	30	Rp 232,910,029	
B.4.2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Paser	30	Rp 232,550,400	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Paser	30	Rp 232,550,400	
C.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Kab. Paser	72	Rp 88,694,435,049	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Kab. Paser	72	Rp 88,694,435,049	
	Bagian Organisasi				Rp 1,602,971,619	Bagian Organisasi				Rp 1,602,971,619	
C.1	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	Kab. Paser	100	Rp 1,602,971,619	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	Kab. Paser	100	Rp 1,602,971,619	
C.1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Paser	41	Rp 636,724,073	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Paser	41	Rp 636,724,073	

C.1.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	4	Rp 455,437,673	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	4	Rp 455,437,673	
C.1.2	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	2	Rp 125,200,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	2	Rp 125,200,000	
C.1.3	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	1	Rp 251,640,300	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	1	Rp 251,640,300	
C.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	3	Rp 133,969,573	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	3	Rp 133,969,573	
	Bagian Umum				Rp 51,507,075,305	Bagian Umum				Rp 51,507,075,305	
C.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Kab. Paser	100	Rp -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Kab. Paser	100	Rp -	
C.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	2	Rp -	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	2	Rp -	

C.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Paser	100	Rp 212,355,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Paser	100	Rp 212,355,000	
C.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	165	Rp 150,075,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	165	Rp 150,075,000	
C.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	180	Rp 62,280,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	180	Rp 62,280,000	
C.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Paser	100	Rp 14,880,892,805	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Paser	100	Rp 14,880,892,805	
C.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	16	Rp 137,472,480	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	16	Rp 137,472,480	
C.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	17	Rp 3,586,443,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	17	Rp 3,586,443,800	
C.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Kab. Paser	25	Rp 359,785,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	25	Rp 359,785,000	

		Disediakan									
C.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	5	Rp 453,422,375	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	5	Rp 453,422,375	
C.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	30	Rp 47,008,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	30	Rp 47,008,000	
C.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Paser	150	Rp 6,904,259,401	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Paser	150	Rp 6,904,259,401	
C.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	150	Rp 3,392,501,749	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	150	Rp 3,392,501,749	
C.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	12	Rp -	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	12	Rp -	
C.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	100	Rp 799,846,800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	100	Rp 799,846,800	
C.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Paser	12	Rp 799,846,800	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Paser	12	Rp 799,846,800	
C.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Paser	100	Rp 25,860,368,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Paser	100	Rp 25,860,368,200	

	Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah yang terpenuhi				Pemerintahan Daerah	Daerah yang terpenuhi				
C.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	Kab. Paser	1	Rp -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	Kab. Paser	1	Rp -	
C.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 2,242,100,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 2,242,100,000	
C.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	15	Rp 16,095,873,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	15	Rp 16,095,873,200	
C.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 7,522,395,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 7,522,395,000	
C.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	100	Rp 6,448,441,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	100	Rp 6,448,441,500	

C.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Paser	25	Rp 734,460,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Paser	25	Rp 734,460,000	
C.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	6	Rp 1,554,155,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	6	Rp 1,554,155,000	
C.7.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	6	Rp 4,159,826,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	6	Rp 4,159,826,500	
C.8	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 3,305,171,000	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 3,305,171,000	
C.8.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 1,664,620,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 1,664,620,000	

C.8.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 1,277,981,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 1,277,981,000	
C.8.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 362,570,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 362,570,000	
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Rp 4,237,566,758	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Rp 4,237,566,758	
C.9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	100	Rp 4,237,566,758	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	100	Rp 4,237,566,758	
C.9.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Paser	12	Rp 1,970,196,300	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Paser	12	Rp 1,970,196,300	
C.9.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	36	Rp 717,926,058	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	36	Rp 717,926,058	
C.9.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Paser	12	Rp 1,549,444,400	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Paser	12	Rp 1,549,444,400	
	Bagian Perencanaan dan Keuangan				Rp 31,346,821,367	Bagian Perencanaan dan Keuangan				Rp 31,346,821,367	

C.10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	100	Rp 231,355,980	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	100	Rp 231,355,980	
C.10.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	6	Rp 99,916,480	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	6	Rp 99,916,480	
C.10.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	12	Rp 65,471,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	12	Rp 65,471,500	
C.10.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	5	Rp 65,968,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	5	Rp 65,968,000	
C.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Paser	100	Rp 29,932,335,137	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Paser	100	Rp 29,932,335,137	

C.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	2268	Rp 29,395,739,495	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	2268	Rp 29,395,739,495	
C.11.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	12	Rp 518,170,642	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	12	Rp 518,170,642	
C.11.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	2	Rp 18,425,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	2	Rp 18,425,000	
C.12	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 1,183,130,250	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 1,183,130,250	
C.12.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	28	Rp 292,440,250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	28	Rp 292,440,250	
C.12.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	10	Rp 88,580,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	10	Rp 88,580,000	

C.12.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	8	Rp 200,900,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	8	Rp 200,900,000	
C.12.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	12	Rp 601,210,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	12	Rp 601,210,000	

B. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi ini diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis saja atau Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah, sedangkan untuk Sekretariat Daerah tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan tidak menampung aspirasi dari masyarakat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai unsur staf, dan termasuk dalam urusan penunjang pemerintah serta berperan sebagai middle line dan supporting staff yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan membantu dalam rangka penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pembinaan Kepegawaian ASN dan pelayanan administratif.

Pada tahun 2024, tidak ada usulan masyarakat yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah kabupaten Paser. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

TABEL, TC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGANTAHUN 2024
TIDAK ADA USULAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Sembilan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Permasalahan pelayanan tugas dan fungsi sekretariat daerah Kabupaten Paser memiliki relevansi yang kuat dengan misi-misi Kementerian Dalam Negeri.

Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi

Telah ditetapkan Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu: **“Berani untuk Kaltim Berdaulat”**

Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan kedalam lima misi yakni :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 mengusung Visi **"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**. Selanjutnya dalam rangka mendorong efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Pemerintah Kabupaten Paser 4 (Empat) Misi, yaitu :

- PERTAMA : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
- KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFESIEN MELALUI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN
- KETIGA : MENGURANGI KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
- KEEMPAT : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 mengacu pada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023,

Tujuan yang digunakan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021 s/d 2026 ada 2 (dua) ada dua (dua) yaitu :

Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi lintas sector pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” memiliki 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu : **Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Daerah** Sedangkan Sasaran yang digunakan mulai tahun 2022 ada 2 (dua) sasaran yaitu : **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Berorientasi Hasil Yang Efektif dan Efisien** dengan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK-RI dan APIP dan **Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kesejahteraan Rakyat yang akuntabel** dengan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi

Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi lintas sector pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan” memiliki 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu : Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan yang meningkat dengan efektif sedangkan sasaran yang digunakan ada 1 (satu) yaitu : **Terwujudnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Efektif dan Efisien** dengan memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun

2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 serta Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser. Secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan dan sasaran.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai melaksanakan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Program Perekonomian dan PembangunanJumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2023 adalah sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan, dan 65 (enam puluh lima) sub Kegiatan;
2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebesar Rp 122,482,469,155,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian

Adapun rencana Program dan Kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel TC.33 sebagai berikut :

Tabel TC.33
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALUDAN CAPAIAN RENSTRA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA KERJA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekretariat Daerah				Rp 122,482,469,155				Rp 122,482,469,155
A	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kab. Paser	100	Rp 4,998,467,561			100	Rp 4,998,467,561
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Kab. Paser		Rp 2,064,638,383				Rp 2,064,638,383
A.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	Kab. Paser	100	Rp 2,064,638,383			100	Rp 2,064,638,383
A.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	1705	Rp 785,574,000			1705	Rp 785,574,000
A.1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Paser	245	Rp 874,000,000			245	Rp 874,000,000
A.1.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	12	Rp 405,064,383			12	Rp 405,064,383
	Bagian Perekonomian		Kab. Paser		Rp 1,285,227,404				Rp 1,285,227,404
A.2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	Kab. Paser	100	Rp 1,285,227,404			100	Rp 1,285,227,404
A.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Kab. Paser	20	Rp 223,780,000			20	Rp 223,780,000

		Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Paser						
A.2.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Paser	42	Rp 333,526,850			42	Rp 333,526,850
A.2.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Paser	20	Rp 529,713,700			20	Rp 529,713,700
A.2.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Paser	25	Rp 198,206,854			25	Rp 198,206,854
	Bagian Administrasi Pembangunan		Kab. Paser		Rp 868,684,900				Rp 868,684,900
A.3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	Kab. Paser	100	Rp 868,684,900			100	Rp 868,684,900
A.3.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Paser	12	Rp 253,605,000			12	Rp 253,605,000
A.3.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Paser	12	Rp 247,283,700			12	Rp 247,283,700
A.3.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Paser	12	Rp 367,796,200			12	Rp 367,796,200
	Bagian Sumber Daya Alam		Kab. Paser		Rp 779,916,874				Rp 779,916,874
A.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Paser	100	Rp 779,916,874			100	Rp 779,916,874
A.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	Kab. Paser	30	Rp 386,875,874			30	Rp 386,875,874
		Modal, Tenaga Kerja	Kab. Paser						

A.4.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Paser	25	Rp 256,342,000			25	Rp 256,342,000
A.4.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Paser	30	Rp 136,699,000			30	Rp 136,699,000
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	Kab. Paser	100				100	
		2. Nilai LPPD	Kab. Paser		Rp 28,789,566,545				Rp 28,789,566,545
	Bagian Tata Pemerintahan				Rp 1,706,018,643				Rp 1,706,018,643
B.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 1,706,018,643			100	Rp 1,706,018,643
B.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Paser	23	Rp 551,056,102			23	Rp 551,056,102
B.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Paser	9	Rp 705,537,596			9	Rp 705,537,596
B.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Paser	3	Rp 449,424,945			3	Rp 449,424,945
	Bagian Hukum				Rp 1,684,298,571				Rp 1,684,298,571
B.2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 1,684,298,571			100	Rp 1,684,298,571
B.2.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Paser	760	Rp 305,991,571			760	Rp 305,991,571

B.2.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Paser	2	Rp 1,177,894,200			2	Rp 1,177,894,200
B.2.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Paser	100	Rp 200,412,800			100	Rp 200,412,800
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				Rp 24,933,788,902				Rp 24,933,788,902
B.3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	Kab. Paser	100	Rp 24,933,788,902			100	Rp 24,933,788,902
B.3.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Paser	357	Rp 16,375,809,902			357	Rp 16,375,809,902
B.3.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Paser	100	Rp 7,928,787,000			100	Rp 7,928,787,000
B.3.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	Kab. Paser						
		Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Paser	15	Rp 629,192,000			15	Rp 629,192,000
	Bagian Kerjasama				Rp 465,460,429				Rp 465,460,429
B.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah	Kab. Paser	100	Rp 465,460,429			100	Rp 465,460,429

B.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Paser	30	Rp 232,910,029			30	Rp 232,910,029
B.4.2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Paser	30	Rp 232,550,400			30	Rp 232,550,400
C.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	Kab. Paser	72	Rp 88,694,435,049			72	Rp 88,694,435,049
	Bagian Organisasi				Rp 1,602,971,619				Rp 1,602,971,619
C.1	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	Kab. Paser	100	Rp 1,602,971,619			100	Rp 1,602,971,619
C.1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Paser	41	Rp 636,724,073			41	Rp 636,724,073
C.1.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	4	Rp 455,437,673			4	Rp 455,437,673
C.1.2	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	2	Rp 125,200,000			2	Rp 125,200,000
C.1.3	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	1	Rp 251,640,300			1	Rp 251,640,300
C.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	3	Rp 133,969,573			3	Rp 133,969,573
	Bagian Umum				Rp 51,507,075,305				Rp 51,507,075,305
C.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Kab. Paser	100	Rp -			100	Rp -
C.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	2	Rp -			2	Rp -
C.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Paser	100	Rp 212,355,000			100	Rp 212,355,000

C.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	165	Rp 150,075,000			165	Rp 150,075,000
C.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	180	Rp 62,280,000			180	Rp 62,280,000
C.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Paser	100	Rp 14,880,892,805			100	Rp 14,880,892,805
C.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	16	Rp 137,472,480			16	Rp 137,472,480
C.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	17	Rp 3,586,443,800			17	Rp 3,586,443,800
C.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	25	Rp 359,785,000			25	Rp 359,785,000
C.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	5	Rp 453,422,375			5	Rp 453,422,375
C.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	30	Rp 47,008,000			30	Rp 47,008,000
C.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	150	Rp 6,904,259,401			150	Rp 6,904,259,401
C.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	150	Rp 3,392,501,749			150	Rp 3,392,501,749
C.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	12	Rp -			12	Rp -
C.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	100	Rp 799,846,800			100	Rp 799,846,800
C.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Paser	12	Rp 799,846,800			12	Rp 799,846,800

C.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kab. Paser	100	Rp 25,860,368,200			100	Rp 25,860,368,200
C.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	Kab. Paser	1	Rp -			1	Rp -
C.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 2,242,100,000			12	Rp 2,242,100,000
C.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	15	Rp 16,095,873,200			15	Rp 16,095,873,200
C.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 7,522,395,000			12	Rp 7,522,395,000
C.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	100	Rp 6,448,441,500			100	Rp 6,448,441,500
C.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Paser	25	Rp 734,460,000			25	Rp 734,460,000
C.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	6	Rp 1,554,155,000			6	Rp 1,554,155,000
C.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	6	Rp 4,159,826,500			6	Rp 4,159,826,500
C.8	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 3,305,171,000			100	Rp 3,305,171,000

C.8.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 1,664,620,000			12	Rp 1,664,620,000
C.8.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 1,277,981,000			12	Rp 1,277,981,000
C.8.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	Rp 362,570,000			12	Rp 362,570,000
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Rp 4,237,566,758				Rp 4,237,566,758
C.9	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	100	Rp 4,237,566,758			100	Rp 4,237,566,758
C.9.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Paser	12	Rp 1,970,196,300			12	Rp 1,970,196,300
C.9.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	36	Rp 717,926,058			36	Rp 717,926,058
C.9.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Paser	12	Rp 1,549,444,400			12	Rp 1,549,444,400
	Bagian Perencanaan dan Keuangan				Rp 31,346,821,367				Rp 31,346,821,367
C.10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Jumlah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	100	Rp 231,355,980			100	Rp 231,355,980
C.10.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	6	Rp 99,916,480			6	Rp 99,916,480
C.10.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	12	Rp 65,471,500			12	Rp 65,471,500

C.10.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	5	Rp 65,968,000			5	Rp 65,968,000
C.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Paser	100	Rp 29,932,335,137			100	Rp 29,932,335,137
C.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	2268	Rp 29,395,739,495			2268	Rp 29,395,739,495
C.11.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	12	Rp 518,170,642			12	Rp 518,170,642
C.11.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	2	Rp 18,425,000			2	Rp 18,425,000
C.12	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Kab. Paser	100	Rp 1,183,130,250			100	Rp 1,183,130,250
C.12.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	28	Rp 292,440,250			28	Rp 292,440,250
C.12.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	10	Rp 88,580,000			10	Rp 88,580,000
C.12.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	8	Rp 200,900,000			8	Rp 200,900,000

C.12.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	12	Rp 601,210,000			12	Rp 601,210,000
--------	---	---	------------	----	----------------	--	--	----	----------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3 Program Perekonomian dan Pembangunan

2. KEGIATAN

- 1 Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 10 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 11 Penataan Organisasi
- 12 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 13 Administrasi Tata Pemerintahan
- 14 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- 15 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- 16 Fasilitasi Kerjasama Daerah

- 17 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- 18 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- 19 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

3. SUB KEGIATAN

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- 6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 9 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 10 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 17 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 19 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- 20 Pengadaan Mebel
- 21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 23 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 26 Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 27 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 28 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
- 29 Pelaksanaan *Medical Check Up*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 30 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
- 31 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- 32 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- 33 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 34 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- 35 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 36 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 37 Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
- 38 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 39 Fasilitasi Keprotokolan
- 40 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- 41 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 42 Penataan Administrasi Pemerintahan
- 43 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- 44 Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 45 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- 46 Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Sosial
- 47 Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Masyarakat
- 48 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

- 49 Fasilitas Bantuan Hukum
- 50 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- 51 Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri
- 52 Evaluasi Kerjasama
- 53 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- 54 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 55 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- 56 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
- 57 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
- 58 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 59 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 60 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 61 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 62 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 122,482,469,155,00 (Seratus dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) untuk pembiayaan 3 (tiga) Program, 19 (Sembilan belas kegiatan) Kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Paser;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Paser.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2023.

Tana Paser, Agustus 2023

Sekretaris Daerah



Drs. Katsul Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211 198609 1 002